Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Rekonstruksi Konstantinopel Pasca-Penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih (1453–1481): Transformasi Kota, Repopulasi, dan Adaptasi Warisan Bizantium

Sandi Rahmat Mahardika
UIN Sunan Ampel Surabaya
sandirahmatmahardika@gmail.com
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II atau Mehmed Al-Fatih pada 29 Mei 1453 menandai perubahan politik sekaligus dimulainya proses pembentukan kembali kota sebagai pusat Kesultanan Utsmaniyah. Makalah ini membahas bagaimana rekonstruksi fisik, kebijakan repopulasi, dan pemanfaatan warisan Bizantium saling berkaitan selama pemerintahan Mehmed II (1451–1481), dengan perhatian khusus pada periode setelah 1453. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui studi pustaka, kritik terhadap sumber sekunder, dan pembacaan komparatif atas kajian tentang kebijakan penduduk, arsitektur, serta ruang kota. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak berlangsung sebagai pemulihan netral atas kota lama, melainkan sebagai proyek politik untuk menghidupkan kembali pusat perkotaan yang mengalami kerusakan dan penyusutan penduduk, sekaligus menegaskan legitimasi penguasa baru. Pemindahan penduduk secara paksa maupun sukarela, perbaikan tembok dan bangunan, pengubahan Hagia Sophia menjadi masjid, serta pembangunan kompleks istana dan keagamaan memperlihatkan perpaduan antara kesinambungan ruang Bizantium dan penataan ulang Utsmaniyah. Dengan demikian, Konstantinopel pasca-1453 lebih tepat dipahami sebagai kota yang dibentuk melalui seleksi, adaptasi, dan pemberian makna baru terhadap warisan sebelumnya.

Kata Kunci: *arsitektur; Bizantium; Konstantinopel; repopulasi; Utsmaniyah*

PENDAHULUAN

Penaklukan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 oleh pasukan Sultan Mehmed II—yang dalam tradisi Indonesia dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih—merupakan peristiwa penting dalam sejarah Mediterania timur. Kota tersebut selama lebih dari satu milenium menjadi pusat Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Ketika jatuh ke tangan Utsmaniyah, Konstantinopel bukanlah kota yang berada pada puncak kemakmuran seperti pada masa-masa sebelumnya. Wilayah kekuasaan Bizantium telah menyusut, kegiatan ekonomi melemah, dan sebagian kawasan kota mengalami kerusakan serta kekosongan penduduk. Kajian Kafescioğlu (2009) menekankan bahwa rekonstruksi

kota setelah penaklukan berkaitan erat dengan pembentukan ibu kota baru dan perubahan konsepsi kekuasaan Utsmaniyah.

Karena itu, peristiwa 1453 tidak cukup dipahami hanya sebagai pergantian penguasa atau kemenangan militer. Setelah penaklukan, Mehmed II menghadapi persoalan bagaimana menghidupkan kembali kota yang luas tetapi tidak seluruhnya berfungsi, mengisi kembali kawasan yang ditinggalkan, mengembangkan perdagangan, dan menjadikan kota tersebut layak sebagai pusat pemerintahan. Dalam catatan Michael Kritovoulos, yang menulis sejarah Mehmed II dari sudut pandang seorang elite Yunani yang hidup dalam masa transisi, pemukiman kembali penduduk dan perbaikan kota termasuk di antara perhatian awal sang sultan. Meski demikian, karya Kritovoulos perlu dibaca sebagai sumber yang memiliki posisi dan kepentingan tertentu, bukan sebagai laporan yang sepenuhnya netral.

Rekonstruksi berlangsung melalui beberapa jalur yang saling berhubungan. Pertama, perbaikan infrastruktur dan bangunan dilakukan untuk memulihkan keamanan serta fungsi kota. Kedua, kebijakan repopulasi diarahkan untuk menambah jumlah penduduk dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Kebijakan ini melibatkan kelompok Muslim, Kristen, dan Yahudi, tetapi juga mencakup pemindahan paksa dari wilayah lain dalam kekuasaan Utsmaniyah. Dengan demikian, repopulasi tidak dapat disederhanakan sebagai migrasi sukarela atau kebijakan toleransi semata; ia juga merupakan tindakan negara untuk mengendalikan komposisi dan persebaran penduduk (İnalcık, 1969–1970).

Ketiga, warisan Bizantium tidak dihapus seluruhnya, tetapi dipilih dan ditafsirkan kembali. Hagia Sophia, yang sebelumnya menjadi gereja utama Kekristenan Ortodoks Timur, dialihfungsikan menjadi masjid kekaisaran. Jalur-jalur kota, monumen, dan sebagian bangunan lama tetap membentuk struktur ruang, sementara fungsi simbolisnya berubah. Strootman (2024) menunjukkan bahwa ruang-ruang monumental seperti Hippodrome dan jalan utama kota memperlihatkan kesinambungan sekaligus perubahan setelah penaklukan. Dalam konteks ini, adaptasi warisan Bizantium berarti penggunaan kembali ruang dan bangunan lama untuk kebutuhan sosial, keagamaan, dan politik yang baru.

Penelitian mengenai Istanbul awal Utsmaniyah telah banyak menelaah arsitektur, kebijakan penduduk, dan pembentukan ibu kota. Kafescioğlu (2009), misalnya, melihat pembangunan kota sebagai bagian dari pembentukan negara dan representasi kekuasaan,

sedangkan İnalcık (1969–1970) membahas kebijakan Mehmed II terhadap penduduk Yunani dan bangunan Bizantium. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami hubungan antara kota dan kekuasaan. Makalah ini menggabungkan ketiga dimensi—transformasi fisik, repopulasi, dan adaptasi warisan—agar rekonstruksi dapat dilihat sebagai proses yang menyeluruh, bukan sebagai daftar proyek bangunan semata.

Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana kebijakan Mehmed II pada 1453–1481 membentuk kembali Konstantinopel sebagai ibu kota Utsmaniyah melalui pembangunan kota, penataan penduduk, dan penggunaan warisan Bizantium. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan bentuk perubahan kota, menilai peran repopulasi dalam pemulihan kehidupan perkotaan, serta menguraikan bagaimana bangunan dan ruang Bizantium diberi fungsi dan makna baru. Kajian ini penting karena memperlihatkan bahwa perubahan ibu kota bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga proses sosial dan simbolis yang melibatkan kelompok penduduk dengan pengalaman berbeda.

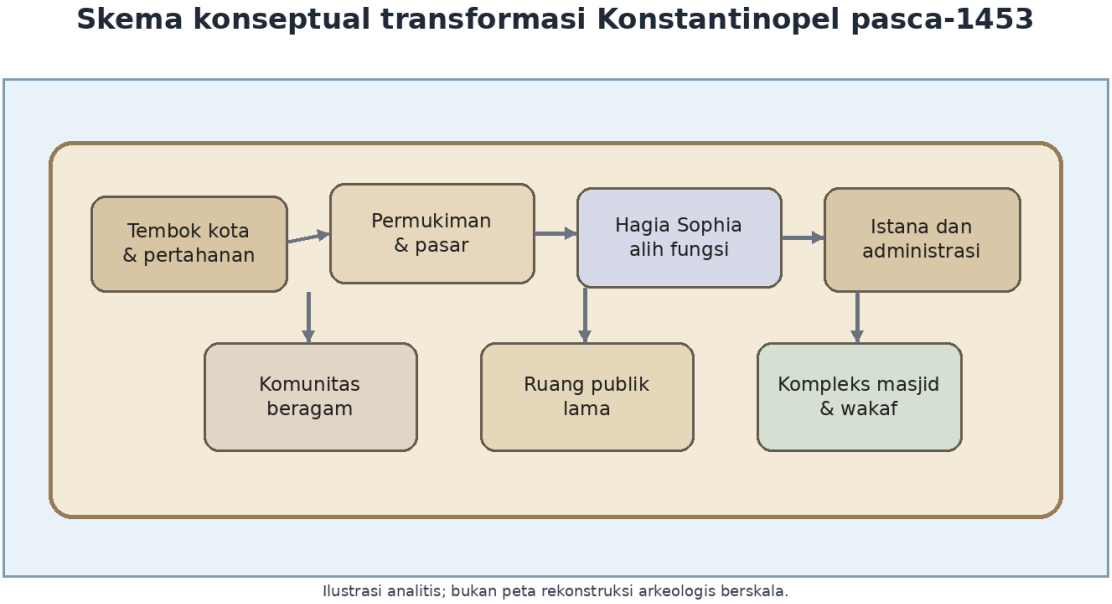
Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Sumber utama yang menjadi titik pijak adalah kajian akademik tentang Istanbul abad ke-15 dan tulisan Kritovoulos yang dibahas dalam penelitian modern. Data dibaca melalui kritik sumber dan perbandingan interpretasi, terutama untuk membedakan keterangan tentang kebijakan sultan dari penafsiran sejarawan kontemporer. Kerangka analisis menempatkan kota sebagai ruang politik: bangunan, jalan, dan permukiman dipahami sebagai unsur yang dapat mempertahankan jejak masa lalu sekaligus membentuk legitimasi penguasa baru. Pembahasan dibatasi pada pemerintahan Mehmed II hingga 1481; perkembangan pada masa sultan-sultan berikutnya hanya digunakan jika diperlukan untuk menjelaskan kesinambungan, bukan dianggap sebagai hasil langsung dari kebijakan Mehmed II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Fisik dan Pembentukan Ibu Kota

Setelah penaklukan, langkah awal rekonstruksi berkaitan dengan pemulihan keamanan dan kelayakan kota. Catatan Kritovoulos, sebagaimana dibahas dalam kajian sejarah modern, menyebut perhatian terhadap perbaikan bagian tembok yang rusak, pembangunan tempat tinggal penguasa, serta usaha mengembalikan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak semata-mata bersifat monumental. Infrastruktur

pertahanan dan hunian menjadi prasyarat bagi pemulihan administrasi, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Skema konseptual transformasi Konstantinopel pasca-1453.

Kafescioğlu (2009) menempatkan tahun-tahun awal pascapenaklukan sebagai masa orientasi, ketika pemerintah Utsmaniyah mulai menentukan bagaimana kota lama dapat melayani kebutuhan rezim baru. Pada dekade-dekade berikutnya, pembangunan semakin terarah dan terhubung dengan gagasan ibu kota kekaisaran. Kompleks istana menjadi pusat administrasi sekaligus simbol keberadaan penguasa. Pembangunan kompleks masjid dan lembaga pendukungnya kemudian menciptakan titik-titik baru bagi kegiatan keagamaan, pendidikan, distribusi bantuan, dan aktivitas ekonomi.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk kota dibangun melalui hubungan antara fungsi praktis dan representasi politik. Perbaikan tembok menegaskan keamanan, sedangkan istana dan bangunan keagamaan menampilkan kemampuan sultan mengorganisasi sumber daya serta mengarahkan kehidupan kota. Dengan demikian, pembangunan fisik merupakan bagian dari pembentukan pusat kekuasaan Utsmaniyah, bukan sekadar pemulihan bangunan yang rusak.

Aspek	Bentuk perubahan	Makna historis
Infrastruktur	Perbaikan pertahanan dan bangunan penting	Memulihkan keamanan dan fungsi kota
Repopulasi	Pemukiman penduduk dari beragam komunitas	Menghidupkan kembali hunian dan ekonomi
Keagamaan	Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid	Menegaskan kedaulatan baru sekaligus memakai bangunan lama
Ruang kota	Ruang monumental lama tetap digunakan dengan fungsi baru	Menunjukkan kesinambungan dan perubahan

Tabel 1. Ringkasan dimensi rekonstruksi Konstantinopel pasca-1453.

Repopulasi dan Pembentukan Masyarakat Kota

Pemulihan Konstantinopel membutuhkan penduduk yang dapat menghidupkan kembali rumah, pasar, pelabuhan, bengkel, dan lembaga keagamaan. Karena jumlah penduduk kota menurun akibat perang, perpindahan, dan penawanan, pemerintah Mehmed II menjalankan kebijakan pemukiman kembali. Sumber-sumber yang dikaji İnalcık (1969–1970) dan Kritovoulos menyebut pemindahan penduduk dari berbagai bagian wilayah Utsmaniyah, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Tujuan kebijakan ini bukan hanya meningkatkan jumlah penduduk, tetapi juga memulihkan kegiatan ekonomi dan memperkuat posisi kota sebagai pusat pemerintahan.

Repopulasi tersebut memiliki sisi yang berbeda-beda. Sebagian orang datang untuk berdagang atau mencari peluang ekonomi; sebagian lainnya dipindahkan melalui perintah negara. Oleh sebab itu, kebijakan ini perlu dipahami sebagai kombinasi insentif, kepentingan ekonomi, dan pemaksaan administratif. Penggunaan istilah repopulasi tidak boleh menutupi pengalaman kehilangan tempat tinggal atau keterputusan komunitas yang dialami kelompok-kelompok yang dipindahkan.

Keberadaan komunitas dengan latar belakang agama dan bahasa yang beragam turut membentuk masyarakat kota Utsmaniyah. Komunitas Kristen Ortodoks tetap hadir dan institusi patriarkat dipulihkan di bawah pengaturan politik baru, sementara penduduk Muslim dan Yahudi juga menjadi bagian dari kehidupan kota. Pengaturan ini tidak berarti bahwa semua kelompok memiliki kedudukan atau pengalaman yang setara. Hubungan

antarkomunitas berlangsung di bawah struktur kekuasaan yang menempatkan sultan sebagai penguasa tertinggi. Karena itu, repopulasi sekaligus memperlihatkan upaya pemulihan ekonomi dan perluasan kendali negara atas ruang perkotaan.

Dari sisi ekonomi, penduduk baru dibutuhkan untuk mengisi kembali lingkungan hunian dan menggerakkan produksi serta pertukaran barang. Kota yang berfungsi sebagai ibu kota memerlukan pengrajin, pedagang, pekerja, pejabat, ulama, dan tenaga pelayanan. Kebijakan penduduk karenanya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan fisik: bangunan tidak akan berfungsi tanpa penghuni, sementara pemukiman baru membutuhkan keamanan, fasilitas, dan pusat aktivitas. Keduanya saling menopang dalam proses pembentukan Istanbul Utsmaniyah.

Adaptasi Warisan Bizantium: Hagia Sophia dan Ruang Kota

Penggunaan warisan Bizantium menjadi salah satu aspek paling jelas dari rekonstruksi. Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid setelah penaklukan dan kemudian menjadi masjid kekaisaran Utsmaniyah. Perubahan fungsi tersebut memiliki makna keagamaan sekaligus politik. Bangunan yang selama berabad-abad menjadi pusat simbolis Kekaisaran Bizantium digunakan untuk menampilkan kedaulatan baru. Necipoğlu (2005) menekankan daya tahan Hagia Sophia sebagai monumen yang mampu menyerap perubahan konteks dan fungsi tanpa kehilangan seluruh karakter arsitektur asalnya.

Adaptasi tidak berarti bangunan dibiarkan tanpa perubahan. Penggunaan sebagai masjid memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan ibadah dan tata ruang keagamaan Islam. Seiring waktu, elemen-elemen baru ditambahkan, sementara sebagian unsur visual Kristen ditutup atau diubah penggunaannya. Namun, perlu dibedakan antara perubahan yang berlangsung pada masa Mehmed II dan penambahan pada masa-masa Utsmaniyah berikutnya. Menisbatkan seluruh bentuk Hagia Sophia yang terlihat sekarang kepada periode 1453–1481 akan mengaburkan sejarah panjang perawatan dan perubahan bangunan tersebut.

Selain Hagia Sophia, ruang-ruang kota Bizantium tetap berpengaruh terhadap struktur Istanbul. Hippodrome, yang dikenal dalam tradisi Utsmaniyah sebagai Atmeydanı, tidak lagi menjalankan fungsi utama sebagai arena perlombaan kereta seperti pada masa Romawi-Bizantium, tetapi ruangnya tetap menjadi tempat berkumpul dan kegiatan seremonial. Strootman (2024) menyoroti bahwa perubahan fungsi ruang

monumental berjalan berdampingan dengan keberlanjutan bentuk dan posisi ruang tersebut dalam tata kota. Ruang lama dapat dipertahankan karena nilai strategis dan simbolisnya, meskipun maknanya ditata ulang.

Adaptasi juga terlihat pada pemanfaatan bangunan dan kawasan lama untuk kebutuhan permukiman, administrasi, dan kegiatan keagamaan. Tidak semua bangunan Bizantium dipertahankan, dan tidak semua perubahan dilakukan dengan cara yang sama. Ada bangunan yang dialihfungsikan, ada yang diperbaiki, dan ada pula yang kehilangan fungsi atau mengalami kerusakan. Dengan demikian, warisan Bizantium tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan yang harus dipertahankan atau dimusnahkan seluruhnya. Pemerintah Utsmaniyah memilih unsur yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan praktis dan citra kekuasaan baru.

Kesinambungan, Perubahan, dan Legitimasi Kekuasaan

Transformasi Konstantinopel setelah 1453 memperlihatkan hubungan yang erat antara kesinambungan dan perubahan. Pada satu sisi, nama, tata ruang, jalur pergerakan, dan bangunan tertentu mempertahankan jejak masa Bizantium. Pada sisi lain, fungsi keagamaan, pusat administrasi, dan simbol-simbol utama kota diatur ulang untuk menampilkan dominasi Utsmaniyah. Proses tersebut tidak berlangsung dalam satu waktu singkat, melainkan melalui serangkaian kebijakan dan proyek yang berkembang sepanjang pemerintahan Mehmed II.

Kafescioğlu (2009) menjelaskan bahwa pembentukan ibu kota Utsmaniyah berjalan bersamaan dengan pembentukan konsep kekaisaran dan posisi sultan. Dalam kerangka ini, pembangunan istana dan kompleks keagamaan tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga menata hubungan antara penguasa, elite, dan penduduk. Kota menjadi sarana untuk memperlihatkan kapasitas negara serta menghubungkan kekuasaan baru dengan prestise imperial yang telah melekat pada Konstantinopel.

Warisan Bizantium dengan demikian berperan sebagai sumber legitimasi sekaligus objek perubahan. Penguasa baru tidak harus menghapus semua simbol lama untuk menyatakan kekuasaan; penggunaan kembali bangunan penting justru dapat menunjukkan bahwa pusat imperial yang lama kini berada di bawah kendali mereka. Namun, proses tersebut juga mengandung ketimpangan dan konflik, terutama bagi penduduk yang mengalami penawanan, pemindahan, atau perubahan status lembaga

keagamaan. Narasi rekonstruksi perlu mengakui kemampuan negara membangun kota sekaligus konsekuensi sosial dari penaklukan.

Secara keseluruhan, rekonstruksi Konstantinopel selama 1453–1481 dapat dipahami melalui tiga proses yang saling terkait. Pembangunan fisik memulihkan dan menciptakan pusat-pusat baru; repopulasi mengisi kembali kota dan mengarahkan komposisi penduduk; sedangkan adaptasi warisan Bizantium menghubungkan ruang lama dengan ideologi serta kebutuhan Utsmaniyah. Ketiganya menjelaskan mengapa perubahan kota tidak tepat dipandang sebagai penggantian total satu peradaban oleh peradaban lain, melainkan sebagai proses selektif yang melibatkan kesinambungan, perubahan, dan perebutan makna.

Periode	**Fokus proses**	**Catatan interpretasi**
1453 dan tahun-tahun awal	Pemulihan pascapenaklukan dan pengisian kembali penduduk	Tahap awal rekonstruksi; bukti harus dibaca kritis
Pertengahan pemerintahan Mehmed II	Pengembangan pusat pemerintahan dan bangunan keagamaan	Kota diarahkan menjadi ibu kota kekaisaran
Menjelang 1481	Penguatan fungsi administratif, sosial, dan simbolis	Sebagian perubahan arsitektur berlanjut sesudah 1481

Tabel 2. Sintesis kronologis proses rekonstruksi selama pemerintahan Mehmed II.

KESIMPULAN

Rekonstruksi Konstantinopel pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan proyek pembentukan ibu kota yang menggabungkan pemulihan infrastruktur, penataan penduduk, dan penggunaan kembali warisan Bizantium. Kota dibangun bukan hanya agar kembali dihuni, tetapi juga agar mampu menjalankan fungsi administratif, ekonomi, dan simbolis sebagai pusat Utsmaniyah. Repopulasi memperkuat kehidupan perkotaan melalui kedatangan berbagai komunitas, tetapi prosesnya juga mencakup pemindahan paksa sehingga tidak dapat dipahami sebagai kebijakan sukarela semata. Pada saat yang sama, Hagia Sophia dan sejumlah ruang kota lama memperlihatkan bagaimana bangunan serta lanskap Bizantium dipertahankan, dialihfungsikan, atau diberi makna baru. Dengan demikian, jawaban atas persoalan penelitian ini adalah bahwa transformasi Konstantinopel berlangsung melalui kesinambungan yang dikendalikan: warisan lama

tetap membentuk kota, tetapi fungsi dan simbolnya disusun ulang untuk menopang legitimasi serta kebutuhan pemerintahan Mehmed II. Proses tersebut meletakkan dasar bagi perkembangan Istanbul sebagai ibu kota Utsmaniyah, meskipun sejumlah perubahan lanjutan terjadi setelah 1481.

DAFTAR PUSTAKA

Amjad-Ali, C. (2021). The historical vicissitudes of Hagia Sophia: From church to mosque to museum, and back to mosque. Journal of World Christianity, 11(1), 131–159. https://doi.org/10.5325/jworlchri.11.1.0131

Atçıl, A. (2016). Scholars in Mehmed II's nascent imperial bureaucracy (1453–1481). In A. Atçıl, Scholars and sultans in the early modern Ottoman Empire (pp. 59–82). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316819326.006

İnalcık, H. (1969–1970). The policy of Mehmed II toward the Greek population of Istanbul and the Byzantine buildings of the city. Dumbarton Oaks Papers, 23/24, 229–249. https://doi.org/10.2307/1291293

Kafescioğlu, Ç. (2009). Constantinopolis/Istanbul: Cultural encounter, imperial vision, and the construction of the Ottoman capital. Pennsylvania State University Press. https://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-02776-0.html

Kastritsis, D. J. (2022). Ottoman urbanism and capital cities before the conquest of Constantinople (1453). In E. Key Fowden, S. Çağaptay, E. Zychowicz-Coghill, & L. Blanke (Eds.), Cities as palimpsests?: Responses to antiquity in Eastern Mediterranean urbanism (pp. 287–306). Oxbow Books. https://doi.org/10.2307/j.ctv25wxc84.20

Kritovoulos. (1954). History of Mehmed the Conqueror (C. T. Riggs, Trans.). Princeton University Press.

Necipoğlu, G. (1991). Architecture, ceremonial, and power: The Topkapı Palace in the fifteenth and sixteenth centuries. MIT Press.

Necipoğlu, G. (1992). The life of an imperial monument: Hagia Sophia after Byzantium. In R. Mark & A. S. Çakmak (Eds.), Hagia Sophia from the age of Justinian to the present (pp. 195–225). Cambridge University Press.

Öztürk, S. (2003). The conversion of the church of Hagia Sophia to a mosque after the conquest of İstanbul. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14. https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/article/276987

Philippides, M., & Hanak, W. K. (2011). The siege and the fall of Constantinople in 1453: Historiography, topography, and military studies. Ashgate.

Runciman, S. (1965). The fall of Constantinople 1453. Cambridge University Press.

Strootman, R. (2024). From Hippodromos to Atmeydanı: Continuity and change in the urban layout of Constantinople after the Ottoman conquest. In D. Burgersdijk, F. Gerritsen, & W. Waal (Eds.), Constantinople through the ages: The visible city from its foundation to contemporary Istanbul (pp. 207–240). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004710986_010

Yerasimos, S. (2000). Istanbul, la naissance de la ville ottomane. In Mégapoles méditerranéennes: Géographie urbaine rétrospective (pp. 398–417). École française de Rome. https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2000_act_261_1_6270